

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan proses untuk menghasilkan pemimpin yang adil, berintegritas, mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak-hak rakyat kepada wakil-wakilnya yang duduk di pemerintahan atau parlemen¹⁹. Sistem pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Hak ini merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin oleh negara. Di Indonesia, pemilihan umum telah diatur dalam konstitusi negara, tepatnya dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Anas et al., 2022).

Partai Politik memiliki peran strategis dalam konsolidasi demokrasi setelah Indonesia merdeka khususnya setelah bergulirnya era reformasi. Kehadiran partai politik memiliki fungsi urgen untuk diperhatikan dan diberikan ruang. Salah satu fungsinya adalah pada *recruitment* politik dalam pengisian jabatan politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif di Indonesia. Fungsi

tersebut akan dirasa berbeda karena sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia agak berbeda dengan sistem negara lain sekalipun sama-sama menggunakan sistem presidensial. Fungsi *recruitment* dapat dilihat pada sistem pemilu yang diselenggarakan di Indonesia baik pada pemilihan anggota legislatif atau juga dalam pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Disamping itu terdapat perbedaan fungsi partai secara kelembagaan pada dua kekuasaan tersebut. Pada kekuasaan legislatif, partai politik diberikan ruang yang cukup fundamental dengan diberikannya hak membentuk fraksi sesuai afiliasi politik sehingga akan memudahkan dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga perwakilan. Sedangkan pada kekuasaan eksekutif, sekalipun partai politik tidak diberikan hak yang sama karena Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial tetapi pengaruh partai politik pada kekuasaan eksekutif dilakukan dalam hubungan ketatanegaraan antara DPR dan Presiden dalam menjalankan wewenang masing-masing (Taufikurrahman, 2019).

Dalam komunikasi politik, sesungguhnya setiap aspek memiliki peran tersendiri, walaupun tetap memiliki hubungan secara langsung ataupun tidak langsung dalam aplikasinya. Lima komponen dalam komunikasi politik tersebut menyangkut Komunikator politik, Pesan Politik, Media yang digunakan dalam komunikasi politik, Khalayak komunikasi politik, dan Akibat yang ditimbulkan dari komunikasi dalam politik (Nimmo, 2007:114).

Klepper (1980:21) menjelaskan bahwa tidak ada alat komunikasi untuk menyampaikan pesan yang dapat dipahami oleh khalayak, selain periklanan yang dapat mencapai publik seefektif iklan. Sedangkan retorika yang berkaitan dengan komunikasi di depan publik, lebih mengarah kepada retorika deliberatif

yaitu, jenis retorika yang menentukan tindakan yang harus diambil oleh khalayak dengan mempengaruhi atau memaparkan aspek yang menarik perhatian (West dan Turner, 2008). Namun strategi persuasi, iklan politik dan retorika tidak semata-mata mampu meraih dukungan massa, karena itu harus menggunakan saluran komunikasi “interpersonal”, “saluran organisasi”, misalnya partai politik, kelompok kepentingan dan organisasi massa yang memiliki tujuan spesifik (Suriyani dan Nurafiah, 2019).

Narasi kampanye menjelang pemilu banyak menggunakan media sosial. Berdasarkan risetnya, eksistensi media sosial telah mampu menarik minat generasi muda untuk berpartisipasi dalam pemilu 2019. Riset lain justru menyebutkan bahwa media sosial sebagai preferensi utama remaja dalam ketertarikan pada politiknya, Partai Demokrat atau secara umum disingkat dengan Demokrat adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003.

Banyaknya pengguna media sosial sudah bukan hal baru lagi di Indonesia bahkan dunia. Ketertarikan masyarakat terhadap media sosial semakin meningkat, yang awalnya hanya digunakan sebagai media berinteraksi dengan teman maupun kerabat dekat, melihat fenomena ini partai politik dan kandidat mulai melirik media sosial sebagai salah satu alat untuk berinteraksi dengan konstituenya, termasuk untuk kampanye politik. Dalam konteks pemilu, media sosial menempati posisi strategis sebagai salah satu media kampanye. Kampanye menggunakan media sosial lebih efektif dari pada spanduk atau baliho. Media sosial dimanfaatkan sebagai alat kampanye politik, terutama menjelang pemilu.

Media sosial yang diminati saat ini adalah Instagram. Maraknya pengguna

Instagram sebagai media sosial memiliki peluang besar dalam sebuah kampanye politik. Instagram menciptakan cara-cara baru untuk memasarkan kampanye politik dan saluran baru bagi kandidat dan pemilih untuk berinteraksi. Selain itu instagram dapat dijadikan sebagai sarana atau media promosi eksistensi bakal calon pimpinan, untuk menginformasikan elektabilitas yang ditawarkan melalui foto atau video, yang bertujuan agar dapat mempengaruhi ketertarikan masyarakat agar mau memilih calon pemimpin dalam konteks penelitian ini adalah Instagram yang digunakan sebagai media kampanye politik partai demokrat.

Selain itu, biaya kampanye media sosial juga lebih murah karena tidak ada biaya yang langsung diasosiasikan dengan media sosial. Media sosial juga unggul karena memberi kesempatan kepada calon pemilih untuk berdialog dua arah dengan kandidat, tidak seperti model kampanye tradisional yang cenderung searah, dari kandidat ke calon pemilih.



Gambar 1.1 Akun Official Partai Demokrat
Sumber : data dari akun resmi @Pdmokrat

Partai Demokrat menjadi sebuah partai yang fenomenal karena satu-satunya partai politik di era reformasi yang mampu menang pemilu secara merata. Tidak hanya pada di tingkat nasional saja, namun juga pada tingkat daerah. Partai Demokrat berhasil mengantar banyak kadernya terpilih dan berhasil menjabat sebagai anggota dewan, mengungguli jumlah utusan dewan dari partai lain. Kemenangan pada pemilu presiden dan pemilu legislatif pusat pada tahun 2004 dan pemilu tahun 2009 yang lalu menunjukkan Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dengan perolehan suara yang besar.

Untuk menyalurkan pesan-pesan dari visi misi tersebut mereka menggunakan media Instagram sebagai salah satu alat komunikasinya, di langsir dari instagram demokrat yaitu @pdemokrat pada tanggal 27 juli 2023 Agus Harimurti Yudhoyono selaku ketua umum partai demokrat menyatakan “Kami mengajak generasi muda untuk tidak takut berbicara. Kebebasan bersuara merupakan nafas dari demokrasi. Anak muda merupakan penggerak sejarah penting di negri ini. Oleh sebab itu, perannya juga sangat berpengaruh agar tak kembali terjadi krisis demokrasi”, selain itu Agus Harimurti Yudhoyono atau sering disebut dengan AHY juga menekankan untuk pemuda ambil peran dan tak takut untuk berbicara.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Berfokus pada bagaimana akun instagram @Pdemokrat dapat mengelola pesan yang tepat untuk menarik perhatian masyarakat pada pemilu 2024.
2. Bagaimana akun instgram @Pdemokrat dapat memastikan bahwa pesan

yang di sampaikan sesuai dengan nilai dan visi partai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana partai politik Demokrat dapat mengelola pesan yang tepat untuk menarik perhatian pemilih pada pemilu 2024?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana partai politik Demokrat dapat mengelola pesan yang tepat untuk menarik perhatian pemilih pada pemilu 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur dalam kajian ilmu komunikasi politik serta menambah pengetahuan teoritis tentang bagaimana partai politik dapat mengelola pesan yang tepat di media sosial.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan partai politik dapat mengelola pesan mereka dengan cara yang efektif untuk mempengaruhi pemilih pada pemilu 2024. Kemudian dengan mengelola pesan partai politik dapat membangun hubungan yang kuat dengan pemilih pemula dan membantu mereka memahami isu-isu yang penting bagi negara dan masyarakat. Dan akan membantu partai politik untuk memenangkan dukungan dari pemilih serta dapat memenangkan pemilu 2024.